

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
(STUDI KASUS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 1993-2008)**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Ance Febrina

Nomor Mahasiswa : 06313004

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
(STUDI KASUS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 1993-2008)**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1

Jurusan Ilmu Ekonomi,
Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



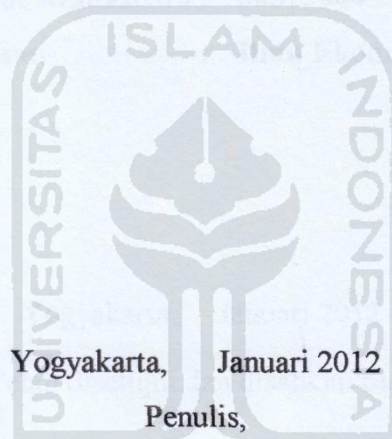
Nama : Ance Febrina
Nomor Mahasiswa : 06313004
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA**

2012

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka Saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.



Ance Febrina

PENGESAHAN

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

(STUDI KASUS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 1993-2008)

Nama : Ance Febrina

Nomor Mahasiswa : 06313004

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, Januari 2012

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si.


PENGESAHAN UJIAN

Telah dipertahankan/diuji dan disahkan untuk
memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana jenjang Strata 1 pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Nama : Ance Febrina
Nomor Mahasiswa : 06313004
Jurusan : Ilmu Ekonomi

Pembimbing Skripsi : Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si.

Penguji I : Drs. Sahabudin Sidiq, MA

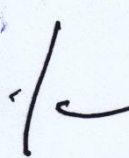

Penguji II : Drs. Awan Setya Dewanta, M.Ec, Dev


Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia



Prof. Drs. Hadri Kusuma, MBA., DBA.


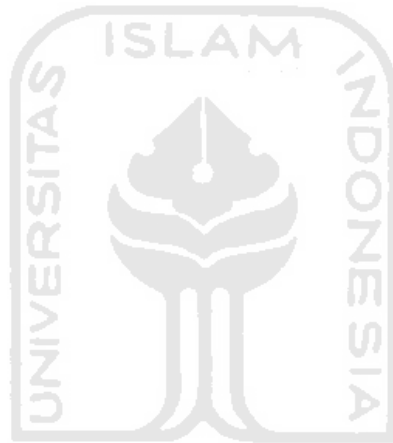
MOTTO

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda orang-orang yang berakal.

(Qs. Ali-Imran : 190)



PERSEMBAHAN



Kupersembahkan Skripsi ini untuk:

- *Kedua orang tuaku*
- *Kakak-kakakku tercinta*
- *Adik-adikku tercinta*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin. Kata itulah yang pantas penulis panjatkan, setelah menyelesaikan skripsi ini. Puji dan syukur selayaknya dipanjkatkan kepada Dzat yang selalu dan diharapkan hadir dalam diri. Hanya lewat kata-katalah, penulis bisa menggambarkan kecintaan kepada-Nya.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan orang-orang di sekitar penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Edi Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Drs. Hadri Kusuma, MBA., DBA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Sahabudin Sidiq, selaku Pembimbing Akademik.
4. Bapak Suharto, selaku Ketua jurusan Ilmu Ekonomi.
5. Bapak Rokhedi, selaku sekretaris jurusan Ilmu EKonomi.
6. Bapak Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang sedemikian rupa di sela-sela kesibukannya menyempatkan waktu untuk memberi bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi khususnya jurusan Ilmu Ekonomi, yang mampu mengenalkan penulis pada dunia ekonomi, agama, dan pengetgahuan lainnya.

8. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi atas pelayanannya.
9. Kedua orang tua (Bapak dan Ibu tercinta) yang tak henti-hentinya selalu mendoakan anaknya.
10. Kakak-kakak, dan adik-adik tercinta yang selalu member motivasi terhadap penulis.
11. Teman-teman penulis di jurusan Ilmu Ekonomi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dengan merekalah penulis selalu berdiskusi dan belajar untuk lebih dewasa dalam pemikiran.
12. Saudara-saudaraku tercinta (Kak Ojik, Tasya, Ranni, Lala) yang telah memberi dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Hasil penelitian ini bukanlah merupakan sesuatu yang sempurna bahkan jauh dari sempurna, tapi semoga menjadi langkah awal bagi penulis khususnya dan para penasehat ekonomi pada umumnya untuk melakukan penelitian-penelitian berikutnya.

Yogyakarta, Januari 2012

Penulis

Ance Febrina

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PLAGIARISME	ii
PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Batasan Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	8
1.6. Sistematika Penulisan	10

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1.	Landasan Teori	12
2.1.1.	Peranan Pemerintah dalam perekonomian.....	12
2.1.2.	Menurut Golongannya.....	15
2.1.3.	Menurut Sifatnya.....	17
2.1.4.	Menurut Lembaga Pemungut.....	19
2.2.	Hasil Penelitian Sebelumnya	26
2.3.	Hipotesis	28
BAB III	MOTODELOGI PENELITIAN	29
3.1.	Objek Penelitian	29
3.2.	Jenis Data	29
3.3.	Teknik Pengumpulan Data	29
3.4.	Definisi Operasional Variabel Penelitian	30
3.5.	Metode Analisis Data	30
3.5.1.	Uji Asumsi Klasik	31
1.	Uji Multikolinieritas	31
2.	Uji Heteroskedastisitas	32
3.	Uji Autokorelasi	33
3.5.2.	Uji Hipotesis	35
1.	Uji Parsial (t-test)	36
2.	Uji Serempak (F-test)	37
3.	Koefisien Determinasi (R^2)	38

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian	39
4.1.1. Perkembangan Tabel yang Diamati.....	41
4.2. Analisis Data	50
4.2.1 Analisis Kuantitatif	51
4.2.1.1 Prasyarat Analisis	53
1. Uji Multikolinieritas	53
2. Uji Autokorelasi	54
3. Uji Heteroskedastisitas	55
4.2.1.2. Pengujian Hipotesa	57
1. Persamaan Regresi	57
2. Uji Serentak (Uji F)	59
3. Uji t (Uji Individual)	61
4. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi	66
4.3. Pembahasan	67
 BAB V PENUTUP	 71
5.1. Kesimpulan	71
5.2. Implikasi	73
 DAFTAR PUSTAKA.....	 74
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	6
Tabel 4.1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) Tahun 1993-2008.....	42
Tabel 4.2. Perkembangan Jumlah Penduduk (angkatan kerja) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	43
Tabel 4.3. Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1993-2008.....	60
Tabel 4.4. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1993-2008.....	62
Tabel 4.5. Perkembangan Jumlah kendaraan Bermotor di Kabupaten/Kota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 1998-2008	68
Tabel 4.6. Hasil uji Heteroskedastisitas Park	71
Tabel 4.7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1. Kurva Fungsi Konsumsi Menurut Keynes	25
Gambar 3.1. Statistik d Durbin Watson	50
Gambar 3.2. Kurva Pengujian T-Test	53
Gambar 3.3. Kurva Pengujian F-Test.....	54
Gambar 4.1. Gambar Penerimaan Ho Untuk Uji Autokorelasi	69
Gambar 4.2. Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa Uji Serentak	75
Gambar 4.3. Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa Variabel Pendapatan Nasional (PDB)	77
Gambar 4.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa Variabel Nilai Tukar (Kurs)	79
Gambar 4.5. Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa Variabel Tingkat Inflasi	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Data Observasi	92
Lampiran 2. Hasil Analisis Regresi	93
Lampiran 3. Uji Multikolinieritas Teknik Klein	94
Lampiran 4. Uji Heteroskedastisitas Teknik Park	96
Lampiran 5. Tabel d	98
Lampiran 6. Tabel Uji F	100
Lampiran 7. Tabel Uji t	101



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh factor-faktor yang meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan bermotor, terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1993-2008.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari data Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA DIY) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Prasyarat yang digunakan adalah asumsi klasik yaitu uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Analisis data dilakukan dengan menghitung nilai deskripsi data dan analisis regresi linier berganda (*Multiple Linear Regression*) dengan taraf signifikansi sebesar 5%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Produk Domestik Produk (PDRB), Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1993-2008. Terdapat pengaruh antara Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1993-2008. Terdapat pengaruh antara Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1993-2008. Terdapat pengaruh antara Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1993-2008.

Kata Kunci : Produk Domestic Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk dapat menciptakan suatu bangsa yang sejahtera, negara membutuhkan dana yang tidak sedikit guna membiayai berbagai keperluan pembangunan dalam arti yang luas. Pemasukan dana yang diterima oleh Negara diperoleh dari 2 (dua) sumber yaitu penerimaan dalam negeri dan bantuan luar negeri. Penerimaan dalam negeri diperoleh dari penerimaan minyak dan gas, penerimaan pajak dan bukan pajak. Sedangkan bentuk bantuan luar negeri adalah bantuan program dan bantuan proyek. Tentu saja dalam penerimaan yang akan lebih diutamakan adalah penerimaan yang berasal dari dalam negeri. Dengan demikian penerimaan yang berasal dari dalam negeri di samping dimaksudkan untuk mendukung peningkatan laju pembangunan juga dimaksudkan untuk secara bertahap memperbaiki struktur sumber pembiayaan Negara dengan mengurangi ketergantungannya kepada sumber dana luar negeri. Sumber penerimaan dana dalam negeri diperoleh dari pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mengurangi ketergantungan aliran dana yang diperoleh dari pemerintah pusat maka daerah harus mampu menggali sumber-sumber potensial yang berasal dari daerahnya sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Nomor 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa yang termasuk sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
 - 1) Hasil Pajak Daerah
 - 2) Hasil Retribusi Daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah
- b. Dana Perimbangan, dan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah

Penerimaan dari segi pajak merupakan pemasukkan dana yang paling potensial bagi negara dan daerah karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Pajak juga memegang peranan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional dan pembangunan di daerah-daerah. Hal ini terbukti dengan semakin besarnya penerimaan Negara dan daerah dari sektor pajak dari tahun ke tahun.

Dengan adanya Otonomi Daerah maka pembangunan nasional yang pada dasarnya merupakan pusat dari pembangunan nasional yang pada dasarnya merupakan pusat dari pembangunan di daerah-daerah telah diarahkan untuk tercapainya pemerataan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah maka pemerintah dan masyarakat itu mengelol sumber daya yang dimiliki daerah yang tersedia secara bersama-sama dengan pola kemitraan untuk tercapainya pembangunan seperti yang diharapkan oleh masyarakat untuk itu diperlukan

peningkatan partisipasi dari seluruh rakyat. Setiap daerah oleh pemerintah pusat diberi hak otonom yang memberikan keleluasaan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan serta mengatur dan membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerahnya.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah yang telah menggantikan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah. Peran Pemerintah Pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervise, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah-langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk

merealisasikan pelaksanaan Otonomi daerah maka sumber pembiayaan pemerintah Daerah tergantung pada peranan PAD. Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun perlu digaris bawahi bahwa tidak semua daerah memiliki kekayaan alam. Hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang dimiliki akan semakin maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang. Kiranya dengan asas ini, pemerintah perlu memberikan jalan keluar agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata.

Dengan demikian siap sudah bagi pemerintah pusat untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang meletakkan peranan daerah pada posisi yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Peranan pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang utama di samping dana perimbangan yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumber daya alam akan sangat menentukan

kekuatan drai APBD. Tujuan utama pembangunan ekonomi daerah antara lain untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja guna mewujudkan tujuan tersebut pemerintah daerah dan masyarakat secara bersama-sama harus memiliki inisiatif dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dan masyarakat berdasarkan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang dimiliki sehingga dapat merancang dan membangun perekonomian daerah. Potensi daerah yang dimiliki dapat dikembangkan sehingga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah pada sektor-sektor yang produktif. Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan yang sampai saat ini mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk menggali sumber dana tersebut diperlukan suatu perencanaan yang matang guna menghindari kekeliruan dalam melakukan prediksi pendapatan dimasa yang akan datang sehingga tidak realitisnya anggaran pendapatan.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kota budaya, paraiwisata dan pelajar. Dan memiliki 5 Kab/kota yang terdiri dari kab. Sleman, Kab, Kulonprogo, Kab. Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai potensi kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi dengan pengelolaan yang baik sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD terutama Pajak daerah. Penerimaan daerah dari bagian PAD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (APBD) dll. Realisasi penerimaan Pajak Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

terhadap Pajak Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2001-2008 dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah di
Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta (Milyar Rp)
Tahun 2001 s/d 2008

No	Tahun	Pajak Daerah	Pajak Kendaraan Bermotor
1	2001	123.516.267.076	53.177.830.870
2	2002	175.519.260.386	66.953.503.135
3	2003	228.143.758.510	87.824.820.800
4	2004	307.631.410.122	120.788.351.375
5	2005	360.119.663.754	149.291.828.905
6	2006	374.578.524.388	176.946.972.390
7	2007	434.898.894.141	206.659.041.270
8	2008	525.186.561.693	222.137.597.800

Sumber : DISPENDA DIY

Berdasarkan table di atas bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pajak Daerah di Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta meningkat dari tahun 2001-2008. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan penerimaan terbesar dalam penerimaan Pajak daerah. Berdasarkan data empiris di atas dapat diketahui bahwa peranan penerimaan yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah cukup tinggi dan potensial di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Atas dasar rasa ingin tahu penulis dengan

didasarkan pada data empiris di atas dan ingin mengetahui berapa besar pengaruhnya terhadap Pajak Daerah. Untuk itu saya sebagai penulis ingin meneliti dengan judul “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 1993-2008)*”.

1.2 Batasan Masalah Penelitian

Untuk dapat memenuhi kebutuhan tujuan penelitian ini terarah pada rumusan masalah yang telah merumuskan dan untuk menghindari timbulnya salah pengertian dan peninjauan yang terlalu luas maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto
2. Jumlah Penduduk
3. Jumlah Kendaraan Bermotor

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 1993-2008?
2. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istomewa Yogyakarta 1993-2008?

3. Apakah Penerimaan Jumlah Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 1993-2008?

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Menganalisis pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pajak Kendaraan bermotor di Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini akan memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan dari informasi yang diperoleh, serta menambah pengalaman peneliti dalam bidang penelitian.

3. Bagi Dunia Pendidikan

Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran dan untuk kemajuan pendidikan. Serta sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.



1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang teori- teori yang sesuai dan melandasi penelitian yang digunakan penulis sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang jenis dan cara pengumpulan data, definisi operasional variable, metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan data penelitian, menyajikan hasil penelitian dan analisis hasil.

BAB V KESIMPULAN

Bagian terakhir atau penutup meliputi kesimpulan dan implikasi yang dapat penulis ajukan sehubungan dengan penulisan yan telah dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Peranan Pemerintah dalam Perekonomian

Dumairy (1997) menyatakan bahwa di Negara manapun selalu ada campur tangan atau intervensi pemerintah dalam perekonomian. Tidak ada pemerintah dalam peraturan ekonomi negerinya berperan hanya semata-mata sebagai wasit atau polisi yang hanya berfungsi membuat undang-undang atau peraturan untuk kemudian menjadi peleraai jika timbul masalah atau penyelamat jika terjadi kepanikan termasuk di negara-negara kapitalis. selanjutnya dalam kancan perekonomian modern, peranan pemerintah dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu:

- 1) Peran alokatif, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.
- 2) Peran distributif, yakni pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar.
- 3) Peran distributif, yakni pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium.

- 4) Peran dinamisatif, yakni pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Adam Smith (1776) dalam Sukimo (1998:393) mengemukakan sesuatu pandangan yang pada hakikatnya menyatakan bahwa kegiatan dalam perekonomian tidak perlu diatur oleh pemerintah. Apabila setiap individu dalam masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi maka kebebasan ini akan mewujudkan efisiensi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi Negara dan dalam jangka panjang akan mewujudkan perekonomian yang teguh. Peran pemerintah dalam perekonomian hanya terbatas dalam penyediaan dan pengembangan infrastruktur dan menjalankan administrasi pemerintah. Dalam melaksanakan pemerintahan diperlukan dana untuk membiayai pembangunan daerah yang bersumber dari tabungan pemerintah, sector perpajakan, pinjaman luar negeri dan lain-lain. Pada umumnya penerimaan pemerintah dapat dibedakan atas penerimaan pajak dan bukan pajak.

1. Pajak Sebagai Salah Satu Penerimaan Negara

Setiap Negara membutuhkan dana untuk menyelenggarakan pemerintahan salah satu sumber dana yang lebih diandalkan Pemerintah Indonesia adalah pajak karena pajak merupakan penerimaan terbesar dalam pendapatan nasional. Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang. Pihak-pihak yang membayar suatu jenis pajak tertentu adalah orang atau badan yang menjadi wajib pajak. Pemerintah dapat menetapkan berbagai jenis pajak yang tariffnya dapat bervariasi, antara lain disebabkan adanya perbedaan pada aspek teknis. Ditinjau dari aspek mikro, pajak

merupakan peralihan uang (harta) dari sector swasta individu ke sector pemerintah tanpa ada imbalan jasa secara langsung. Pajak mengurangi pendapatan seseorang dan sudah barang tentu mengurangi daya beli individu sehingga pajak dapat mengubah konsumsi dan pola hidup individu. Dari sisi makro, pajak merupakan penerimaan Negara dan digunakan untuk membiayai kepentingan masyarakat sehingga memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat. Pajak dapat mempengaruhi harga barang-barang di pasar dan system pengupahan, pengangguran dan sebagainya. Jenis pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan yang merupakan keperluan publik.

Menurut Rochmat Soemitro (R Santoso Brotodihardjo, 1993, p.5-6):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sector partikelir ke sector pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Menurut S.I.Djajadiningrat (Munawir, 1995, h.3) adalah sebagai berikut:

“ Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi tetpi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

- a. Pajak dipungut oleh Negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontraprestasi dari Negara.
- c. Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan untuk *public investment*.
- d. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgeter* yaitu mengatur.

2.1.2 Menurut Golongannya

Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Berikut ini diuraikan pengertian masing masing:

a. Pajak Langsung

Dalam pengertian ekonomis pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib Pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh: pajak penghasilan

b. Pajak Tidak Langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan pembuatan akte.

Contoh: Pajak pertambahan nilai, bea materai dan bea balik nama.

Manfaat pembedaan pajak ke dalam pajak langsung dan pajak tidak langsung adalah:

- 1) Untuk keperluan sistematik dalam ilmu pengetahuan, misalnya untuk menentukan
- 2) Saat timbulnya hutang pajak
- 3) Kadaluarsa
- 4) Tagihan susulan

Untuk menentukan cara mengadakan proses keadilan karena perselisihan:

- a) Pajak langsung lazimnya diselesaikan melalui peradilan administrasi
- b) Pajak tidak langsung : diselesaikan di muka hakim biasa.
- c) Untuk menghindari kekebalan perwakilan asing. Mereka hanya dikecualikan dari pengenaan pajak langsung sedangkan terhadap pajak tidak langsung tidak dikecualikan.

Dalam memilih cara untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung ataupun pajak tidak langsung dalam arti ekonomis dapat diikuti cara yang

lazim dalam ilmu ekonomi, yaitu dengan melihat terlebih dahulu tiga unsure yang terdapat dalam kewajiban memenuhi pajak. Tiga unsur tersebut menurut John Stuart Mill (R Santoso Brotodihardjo, 1993) adalah:

- a) Penanggungjawab pajak (Wajib Pajak) yakni orang, yang secara formak yuridis diharuskan melunasi pajak, yaitu bila padanya terdapat factor-faktor atau kejadian-kejadian yang menimbulkan sebab (menurut Undang-undang) untuk dikenakan pajak.
- b) Penanggungjawab pajak adalah orang, yang dalam faktanya (dalam arti ekonomis) memikul dulu beban pajaknya.
- c) Yang ditunjuk oleh pembuat Undang-undang, juga dinamakan pemikul pajak, yaitu orang yang menurut pembuat Undang-undang harus dibebani pajak.

Catatan: Jika ketiga unsure ditemukan pada seorang maka pajaknya adalah pajak langsung. Namun jika terpisah (jadi jika terdapat pada lebih dari satu orang) maka kita berhadapan dengan pajak tidak langsung.

2.1.3 Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Berikut diuraikan pengertian masing-masing:

- a) Pajak Subjektif (bersifat perorangan)

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul, sebagai contoh adalah pajak penghasilan orang pribadi,

hubungan antara pajak dan Wajib Pajak (subjek) adalah langsung oleh karena besarnya Pajak Penghasilan yang harus dibayar tergantung kepada besarnya gaya pikulnya,; pada pajak-pajak subjektif ini keadaan Wajib Pajak sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang terutang. Menurut De Langen , gaya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi dengan yang mutlak untuk kebutuhannya yang primer. Karena itu ia sampai pada kesimpulannya, bahwa gaya pikul adalah kekuatan untuk membayar pajak kepada Negara setelah kekuatan orang yang bersangkutan dikurangi dengan minimum kehidupan. Sedangkan menurut Sinninghe Damste berpendapat bahwa gaya pikul adalah suatu akibat dari beberapa komponen terutama pendapatan, kekayaan, susunan keluarga dari wajib pajak dengan mengingat factor-faktor yang mempengaruhi keduanya.

b) Pajak Objektif (bersifat kebendaan)

Pajak objektif pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berkediaman di Indonesia atau tidak.

2.1.4 Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak Negara (pajak pusat) dan pajak daerah.

1. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga Negara pada umumnya.

a. Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak

- 1) PPN
- 2) PBB
- 3) Bea materai
- 4) Bea lelang

b. Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai)

2. Pajak Daerah

Pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti Propinsi, Kabupaten maupun Kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing.

a. Pajak-pajak tingkat Propinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Bea Balik Nama Tanah
- 4) Pajak ijin penangkapan ikan di wilayahnya

b. Pajak-pajak tingkat Kabupaten/Kotamadya

- 1) Pajak atas pertunjukkan dan keramaian umum
- 2) Pajak atas reklame
- 3) Pajak anjing
- 4) Pajak atas kendaraan tidak bermotor
- 5) Pajak pembangunan\
- 6) Pajak radio
- 7) Pajak jalan
- 8) Pajak bangsa asing
- 9) Pajak potong hewan, dan lain-lain

c. Macam-macam pajak yang lain:

- 1) Bea jalan/jembatan
- 2) Bea pangkalan
- 3) Bea penambangan
- 4) Uang sempadan/ijin bangunan
- 5) Uang atas penguburan
- 6) Uang pengujian kendaraan bermotor
- 7) Retribusi stasiun bis,taksi,dan lain-lain
- 8) Retribusi jembatan timbang
- 9) Retribusi pasar
- 10) Retribusi pesanggrahan

- 11) Retribusi pelelangan ikan dan lain-lain
- 12) Retribusi rekreasi

3. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan termasuk alat-alat berat dan alat-alat berat bergerak. Pajak Kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sehingga secara otomatis yang menjadi objek dari pajak kendaraan bermotor tetapi atas pajak ini terdapat juga beberapa jenis objek yang dikecualikan dari pengenaan pajak, yaitu kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh:

- a. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- b. Kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga Internasional berdasar atas timbale balik
- c. Subjek pajak lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pemungutan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) didasarkan pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu penerapan Penerapan Pajak Bermotor di daerah propinsi yang bersangkutan serta keputusan gubernur yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor pada propinsi yang dimaksud.

1. Objek PKB

Objek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam objek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan disemua jenis jalan darat, antyara lain: di kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industry, perdagangan dan sarana olahraga dan rekreasi. Pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah propinsi yang bersangkutan. Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah propinsi selama jangka waktu tertentu.

2. Bukan Objek PKB

Pada PKB, tidak sama kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pihak-pihak di bawah ini:

- a. Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b. Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga Internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.
- c. Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh subjek pajak lainnya yang diatur peraturan daerah.

Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh subjek pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah antara lain sebagaimana di bawah ini:

- (1) Orang pribadi yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat.
- (2) BUMN yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan keselamatan.
- (3) Pabrikasi atau milik importer yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual, dan tidak untuk dipergunakan dalam lalu lintas bebas.
- (4) Turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu enam puluh hari.
- (5) Kendaraan pemadam kebakaran.
- (6) Kendaraan bermotor yang disegel atau disita Negara.

a. Subjek Pajak dan Wajib Pajak PKB

Pada PKB, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau penguasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran pajak terutang. Selain itu,

wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

4. Pengertian PDRB

Beberapa indikator ekonomi yang digunakan dalam kaitannya dengan Penerimaan Pajak Daerah antara lain PDRB, inflasi, jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, dan tariff pajak. (Agustinus Antoni, 2001:54). Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan suatu daerah namun cukup representative dan sangat lazim digunakan. PDRB bukan hanya berguna untuk menilai pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari waktu ke waktu tapi juga membandingkannya dengan daerah lain. Bila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat dari tahun ke tahun (*ceteris paribus*), akan menyebabkan meningkatnya pendapatan perkapita, tingginya nilai pendapatan perkapita mencerminkan kesejahteraan suatu daerah semakin baik sehingga pajak yang akan diterima suatu daerah juga akan semakin meningkat.

PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Kegiatan ekonomi yang dimaksud kegiatan pertanian, pertambangan, industry pengolahan, sampai dengan jasa. Dalam perhitungannya, untuk menghindari hitung ganda, nilai output bersih diberi nama sevara spesifik, yaitu nilai tambah (*value added*). Demikian juga, harga yang digunakan dalam perhitungan ini adalah harga produsen. Penilaian pada harga konsumen akan menghilangkan PDRB. Subsector perdagangan dan sebagian subsector pengangkutan. PDRB juga

merupakan jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah dalam satu kurun waktu. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada kurun waktu tersebut, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar, yang selanjutnya disebut sebagai tahun dasar.

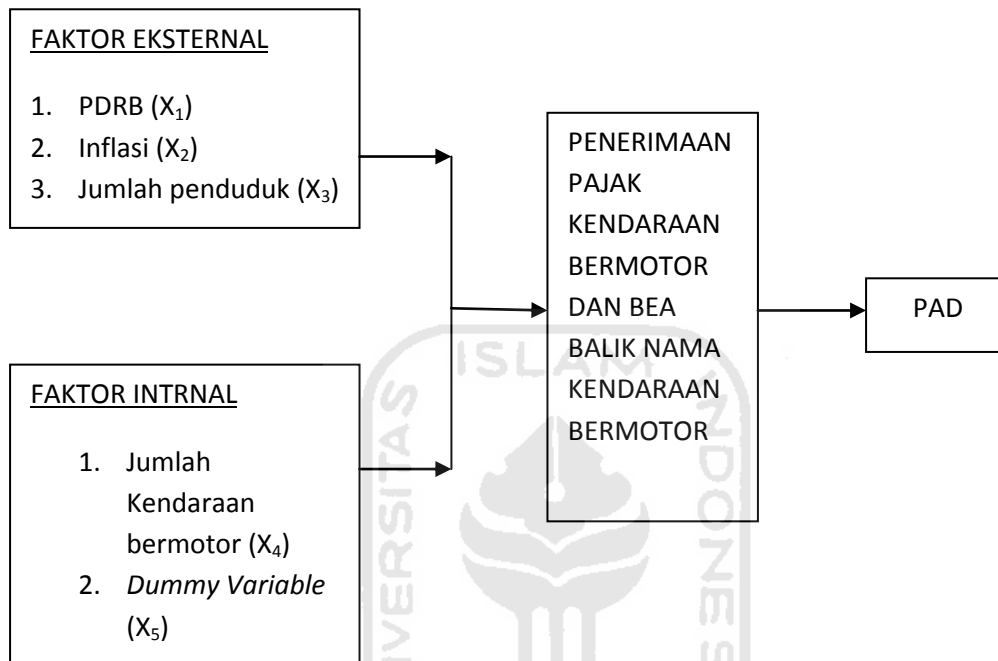
PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Untuk menghitung PDRB ada tiga pendekatan yang digunakan, yaitu:

- a. Jika ditinjau dari sisi produksi disebut Produk Regional, merupakan jumlah nilai tambah (produk) yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang dimiliki penduduk suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.
- b. Jika ditinjau dari sisi pendapatan disebut Pendapatan Regional, merupakan jumlah pendapatan (balas jasa) yang diterima oleh factor-faktor produksi berupa upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tak langsung neto yang dimiliki penduduk suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.
- c. Jika ditinjau dari segi pengeluaran disebut Pengeluaran Regional, merupakan jumlah pengeluaran konsumsi atau komponen permintaan akhir yang dilakukan oleh rumah tangga, lembaga swasta nirlaba, pemerintah, pembentukan modal tetap domestic bruto, perubahan stok dan ekspor neto (selisih ekspor terhadap impor) suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Skema Kerangka Pemikiran:

Berdasarkan kerangka teoritis yang telah dikemukakan dapat disederhanakan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1.

Skema Kerangka Pemikiran

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Darwin Hasan (2000), dalam penelitian mengenai factor-faktor yang Mempengaruhi Panerimaan Pajak Hiburan di Kota Palembang yaitu bahwa jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, inflasi, jumlah tempat hiburan dan keringanan pajak secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan, sedangkan investasi tidak berpengaruh signifikan.

Slamet Bamim (2002), dalam penelitian mengenai analisis factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di daerah provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) yaitu yang mana hasilnya menunjukkan bahwa PDRB, inflasi, jumlah kendaraan bermotor, dan jumlah penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor secara signifikan. Berdasarkan besaran elastisitasnya variabel yang berpengaruh positif dan signifikan secara statistic yaitu variable PDRB dan inflasi. Sedangkan jumlah kendaraan bermotor dan jumlah penduduk berpengaruh negative dan tidak signifikan secara statistic.

Enda Wijaya (2003), dengan mengambil judul “ Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Kota Yogyakarta)”. Dalam penelitian tersebut menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah wajib pajak, dan tarif pajak rata-rata. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Penerimaan pajak daerah dikatakan tinggi apabila di suatu daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penerimaan pajak daerah dikatakan rendah apabila di suatu daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah karena tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dilihat dari pendapatan per kapita tiap penduduk di daerah tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi adalah tingkat inflasi, karena semakin tinggi tingkat inflasi maka penerimaan pajak daerah semakin rendah dan

sebaliknya. Inflasi adalah kecendrungan naiknya harga barang secara umum dan terjadi secara terus menerus. Apabila tingkat inflasi tinggi bukan tidak mungkin penerimaan pajak daerah akan rendah. Hal ini dikarenakan pendapatan wajib pajak berkurang. Pengujian dalam penelitian Enda Wijaya (2003) menggunakan regresi linear berganda dengan pengujian statistic secara individu dan serempak.

Dari hasil perhitungan data dari tahun 1997-2000 diketahui bahwa variabel independen pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif, variabel independen tingkat inflasi berpengaruh negative, variabel independen jumlah wajib pajak berpengaruh positif. Dari uraian penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tariff pajak rata-rata berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dan variabel tingkat inflasi dan jumlah wajib pajak tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

2.3. Hipotesis

1. Diduga variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Daerah Propinsi Istimewa Yogyakarta.
2. Diduga variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Daerah Propinsi Istimewa Yogyakarta.
3. Diduga variabel Jumlah Kendaraan bermotor (JKB) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Daerah Propinsi Istimewa Yogyakarta

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor, yang akan dijadikan sebagai variabel terikat (dependen variable). Dalam melakukan analisa lebih lanjut mengenai Pajak Kendaraan Bermotor akan digunakan beberapa variabel yang diperkirakan memiliki kegiatan dengan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel-variabel tersebut adalah Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan Bermotor (JKB) 1993-2008.

3.2. Jenis Data

Jenis data yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber lain yaitu berupa data dari Dinas Pendapatan Asli Daerah (DISPENDA DIY) dan Badan Pusat Statistik (BPS DIY). Adapun data yang diambil adalah data Pajak Kendaraan Bermotor, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan Bermotor (JKB).

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam mendukung penelitian ini akan digunakan data kuantitatif yang dapat diuji dengan alat uji data. Data diperoleh dari Berbagai sumber yaitu Dinas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pusat Statistik (BPOS DIY), buku-buku yang relevan terhadap penelitian ini,

penggunaan jasa internet dan karya-karya ilmiah serta sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.

3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai definisi pajak yang dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto mempunyai definisi merupakan pertumbuhan atau persentase produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Jumlah Kendaraan Bermotor

Jumlah unit kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat dalam satu tahun fiscal yang berada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.5. Metode Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang bersifat kuantitatif, yaitu dengan menafsirkan angka-angka hasil penelitian. Metode pengujian hipotesis, meliputi uji asumsi klasik, yaitu suatu pengujian untuk mendeteksi ada tidaknya masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas maupun autokorelasi. Sedangkan pengujian hipotesis dengan menggunakan

analisis regresi linier berganda (*multiple linear regression*) yang meliputi pengujian koefisien regresi secara 'partial' (individu) yaitu menggunakan uji t (*t test*), pengujian secara serempak (*F test*), pengujian koefisien determinasi R^2 .

3.5.1. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan mempunyai penyakit atau tidak perlu diadakan uji kevalidan data. Dalam metode pengujian hipotesis ini, meliputi uji asumsi klasik, yaitu suatu pengujian untuk mendeteksi ada tidaknya masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas maupaun autokorelasi. Dan juga meliputi pengujian koefisien regresi secara 'partial' (individu) yaitu menggunakan uji t (*t test*), pengujian secara serempak (*f test*), pengujian koefisien determinasi R^2 .

1. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, berarti terdapat problem multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Cara mendeteksi masalah multikolinearitas:

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan sangat tinggi, tapi tingkat signifikansi variabel bebas berdasarkan uji t statistik sangat kecil atau bahkan tidak ada variabel bebas yang signifikan.
- b. Menggunakan korelasi parsial korelasi antar variable independent harus lemah (dibawah 0,5), jika korelasi kuat maka terjadi problem multikolinearitas.

Cara mengatasi masalah multikolinearitas :

- a. Transformasi variabel
- b. Menambah data baru

2. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Akibat dari adanya heteroskedastisitas pada hasil regresi, adalah sebagai berikut :

- a. varians tidak lagi minimum
- b. pengujian dari koefisien regresi menjadi kurang kuat
- c. koefisien penaksir menjadi biasa
- d. kesimpulan yang diambil menjadi salah

Untuk menguji ada tidaknya kasus heteroskedastisitas pada regresi dapat dilakukan dengan metode pengujian park' (*Gujarati*, 1997:370). Park menformalkan metode grafik dengan menyarankan bahwa σ^2 adalah suatu fungsi yang menjelaskan Xi. Bentuk fungsi yang di sarankan adalah:

$$\sum_i 2 = \sigma^2 X^\beta e^0$$

Atau

$$\ln\sigma_i^2 + \beta \ln X + v$$

Dimana v adalah unsur gangguan (disturbance)

Karena σ^2 biasanya tidak diketahui, park menyarankan untuk menggunakan e^2 sebagai pendekatan dan melakukan regresi sebagai berikut :

$$\ln e^2 = \ln \sigma^2 + \beta \ln X + v$$

$$= \alpha + \beta \ln X + v$$

Jika β ternyata signifikan secara statistik, ini dalam regresi tersebut terdapat heteroskedastisitas.

Apabila ternyata tidak signifikan, kita bisa menerima asumsi homoskedastisitas.

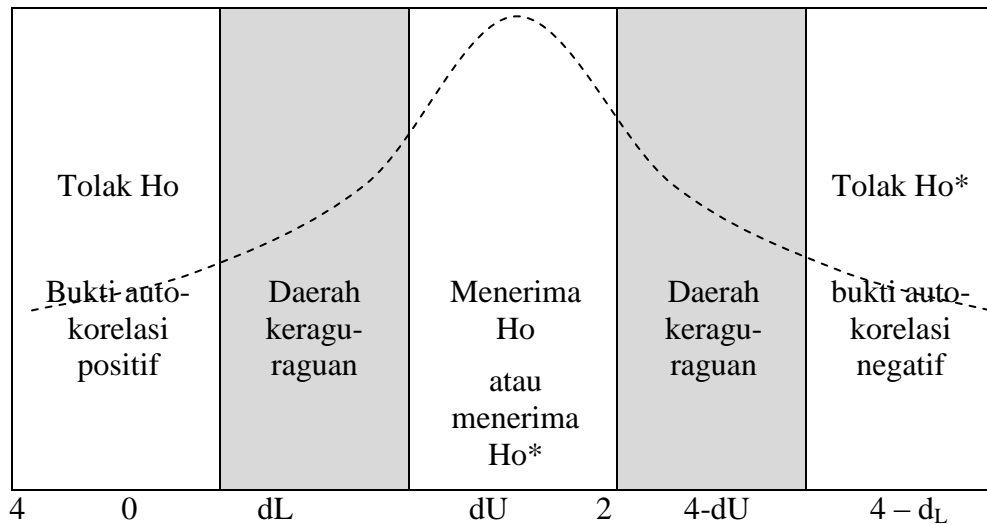
Pengujian park merupakan prosedur dua tahap. Dalam tahap pertama kita melakukan OLS dengan tidak memandang persoalan heteroskedastisitas dan tahap kedua kita melakukan regresi seperti di atas.

Jika β ternyata signifikan secara statistik, ini berarti didalam regresi tersebut terdapat heteroskedastisitas.

Apabila ternyata tidak signifikan, kita bisa menerima asumsi homoskedastisitas. Pengujian park merupakan prosedur dua tahap. Dalam tahap pertama kita melakukan regresi OLS dengan tidak memandang persoalan heteroskedastisitas dari tahap kedua kita melakukan regresi seperti diatas.

3. Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam persamaan regresi adalah menggunakan Uji Durbin-Watson atau yang lebih dikenal dengan statistik d . Kriteria pengambilan keputusan untuk pendeteksian ada tidaknya autokorelasi dengan membandingkan statistik d yang diperoleh dengan d tabel yang terdapat dalam tabel Durbin Watson pada tingkat kepercayaan 5%. Secara spesifik daerah penerimaan dan penolakan hipotesa uji Durbin Watson, disajikan pada gambar berikut :



Gambar 3.1

Statistik d Durbin-Watson

Mekanisme penerimaan atau penolakan hipotesa adalah :

1. Jika H_0 adalah tidak ada serial korelasi positif.

$d < d_L$: menolak H_0

$d > d_U$: tidak menolak H_0 .

$d_L \leq d \leq d_U$: pengujian tidak meyakinkan

2. Jika H_0 (H_0^*) tidak ada serial korelasi negatif :

$d > 4 - d_L$: menolak H_0

$d < 4 - d_U$: tidak menolak H_0 .

$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$: pengujian tidak meyakinkan

3. Jika H_0 adalah tidak ada serial korelasi baik positif maupun negatif.

$d < d_L$: menolak H_0

$d > 4 - d_L$: menolak H_0

$dU < d < 4 - dU$: tidak menolak H_0 .

$dL \leq d \leq dU$: pengujian tidak meyakinkan

$4 - dU \leq d \leq 4 - dL$: pengujian tidak meyakinkan

3.5.2. Uji Hipotesis

Bentuk umum model analisis regresi linier berganda yang digunakan sebagai alat analisis untuk pembahasan mengenai seberapa besar pengaruh factor-faktor yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor. Analisis regresi linier berganda merupakan teknik analisis yang mencoba menjelaskan ketergantungan suatu variabel terikat (*dependent variable*), untuk mengestimasi atau meramalkan nilai rata-rata tambahan berdasarkan nilai tetap variabel bebas (*independent variable*) (Gujarati, 1988, hal. 146).

Model regresi linear yang digunakan sebagai alat analisis adalah menggunakan persamaan regresi berganda, yang dijelaskan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

Y = Penerimaan Pajak kendaraan Bermotor

X_1 = Pertumbuhan PDRB

X_2 = Jumlah Penduduk

X_3 = Jumlah Kendaraan Bermotor

e = kesalahan pengganggu

1. Uji Parsial (t test)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independent) secara individual terhadap variabel tak bebas (dependen).

Hipotesis yang digunakan :

$H_0 : \beta = 0$, artinya variabel independen tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependen.

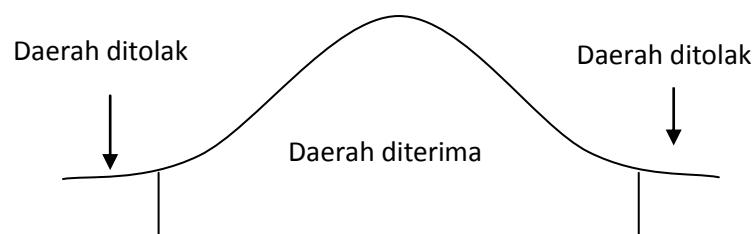
$H_0 : \beta \neq 0$, artinya variabel independen berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependen.

Pengujian ini dilakukan dengan rumus:

$$t_{\text{hitung}} = \frac{\alpha}{Se(\alpha)}$$

Bila t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak, berarti variabel bebas yang diamati berpengaruh secara nyata terhadap variabel terikat. Bila t hitung $<$ t tabel maka H_0 diterima, berarti variabel bebas yang diamati tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel terikat.

Dengan selang keyakinan (confidence of interval), $\alpha = 5\%$ untuk mengetahui t -tabel dapat digambarkan daerah penerimaan H_0 dan penolakan H_0 sebagai berikut :



Gambar 3.2

Kurva Pengujian T- Test

2. Uji Serempak (F test)

Untuk mengetahui peranan variabel bebas secara keseluruhan dilakukan dengan uji f. Kesimpulan uji f dapat diperoleh dengan membandingkan antara f statistik dengan f tabel pada tingkat tertentu dan derajat bebas tertentu.

Pengujian ini dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$f\text{-hitung} = \frac{R^2 - k}{(1 - R^2 - n - k - 1)}$$

dimana:

R^2 = koefisien determinasi

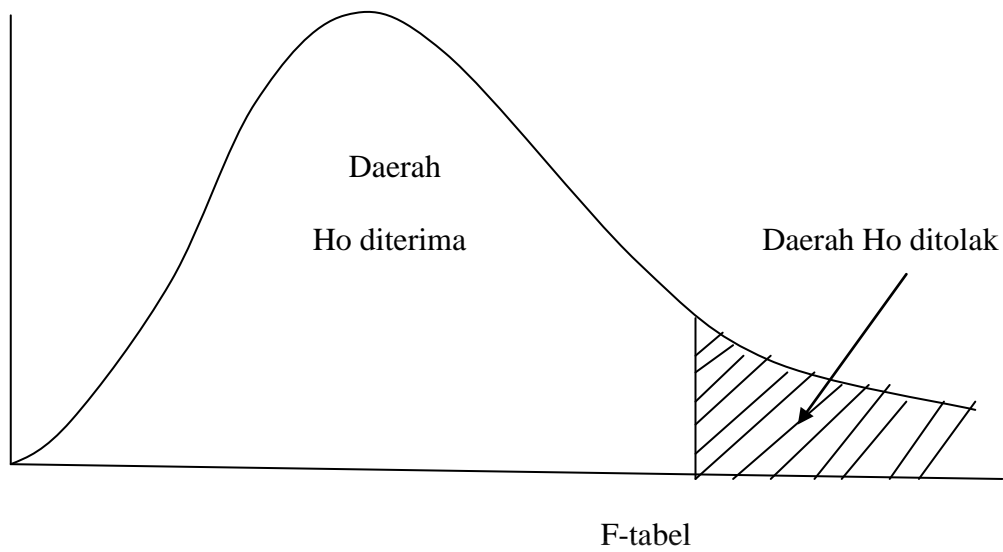
K = jumlah parameter yang diasumsikan

N = jumlah sampel

Bila F hitung > F tabel maka H_0 ditolak, berarti secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh secara nyata dan signifikan terhadap variabel terikat.

Bila F hitung < F tabel maka H_0 diterima, berarti secara bersama-sama variabel bebas tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel terikat.

Secara visual daerah penerimaan dan penolakan hipotesa untuk uji serentak disajikan pada gambar 3.3 berikut :



Gambar 3.3

Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa Uji Serentak

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Determinasi R^2 ini digunakan untuk mengukur proporsi variasi variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya. Nilai R^2 terletak $0 \leq R^2 \leq 1$, semakin mendekati 1 berarti modelnya semakin baik.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Perkembangan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta, Perekonomian DIY diperkirakan tumbuh sebesar 5,00%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan II-2008 (-1,35%) dan juga triwulan I-2009 (3,08%). Di sisi permintaan, sumber pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi dan investasi. Pertumbuhan konsumsi mengalami peningkatan karena dipengaruhi oleh mulai pulihnya daya beli masyarakat. Nilai Tukar Petani (NTP) yang masih positif, lancarnya penyaluran BLT, dan inflasi yang relative terjaga merupakan factor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, walaupun di sisi lain PHK sedikit meningkat karena sector industry masih dalam masa pemulihan. Sementara itu konsumsi pemerintah pada triwulan II-2009 juga meningkat karena dimulainya penarikan dana stimulus fiscal dan pembayaran gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Investasi dipengaruhi oleh ekspansi beberapa investor dari dalam negeri untuk membangun ataupun mengembangkan usaha di DIY. Sementara itu, di sisi penawaran, searah dengan pengembangan di sisi permintaan, percepatan pertumbuhan terjadi pada sector Pertanian dan sector jasa-jasa. Sektor perdagangan, Hotel dan Restoran diperkirakan tumbuh relative moderat.

Pada triwulan II-2009 tekanan inflasi DIY melemah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara triwulan inflasi triwulan laporan 11% (q to q) turun dari triwulan I-2009 (0,59%). Secara tahunan inflasi juga turun menjadi 4,50%,

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 8,38%. Level inflasi triwulan laporan tersebut telah jauh menurun dari puncaknya pada Oktober 2008 yang mencapai 10,77%. Penurunan inflasi tersebut antara lain disebabkan oleh terjaganya pasokan kebutuhan pokok, harga BBM yang relative terjaga lebih rendah dan ekspektasi inflasi yang membaik. Selain itu dari sisi permintaan tekanan konsumsi cenderung stabil.

Sejalan dengan mulai meredanya tekanan terhadap sector keuangan, kinerja perbankan DIY mulai berkembang relative lebih baik. Dana Pihak ketiga tumbuh sebesar 14,08% dan namun pertumbuhan kredit mencapai 11,17%. Dengan perkembangan tersebut, fungsi intermediasi perbankan menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya dengan LDR mencapai 57,14%. Di samping itu, tren resiko kredit, resiko pasar maupun resiko likuiditas masih relative terkendali. NPL perbankan secara agregat masih di bawah 5%. Proyeksi perkembangan makro ekonomi DIY pada Triwulan III-2009 diperkirakan masih tumbuh. Pertumbuhan ini pada sisi permintaan didorong oleh investasi dan konsumsi rumah tangga. Investasi pada Triwulan III-2009 diperkirakan meningkat karena pada triwulan tersebut dunia usaha diperkirakan sudah mulai membelanjakan investasinya, demikian juga dengan proyek investasi pemerintah. Kinerja sector pertanian, sector PHR, sector jasa-jasa, dan sector bangunan diperkirakan masih cukup dominan mempengaruhi kinerja ekonomi triwulan III-2009, inflasi diperkirakan masih terjadi pada triwulan III-2009 dengan kecendrungan menurun, dan akan berada pada kisaran bawah 3,80% + 1%.

Faktor-faktor yang dapat menghambat kenaikan harga-harga adalah pasokan dan stok komoditi bahan pangan yang relative tercukupi.

4.1.1. Perkembangan Variabel Yang Diamati

1. Produk Domestik Regional Bruto di DIY

Berdasarkan perhitungan PDRB atas harga konstan, perekonomian Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2008 tumbuh sekitar 5,02%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,31%. Hal yang mengembirakan dari gambaran ekonomi D.I. Yogyakarta tahun 2008 adalah pertumbuhan positif dari seluruh sector. Sektor transportasi 6,61%, sector bangunan, perdagangan, keuangan, pertanian, dan listrik/gas/air masing-masing sebesar 6,09%, 5,73%, 5,63%, dan 5,53%. Sedangkan pertumbuhan sector jasa-jasa dan sector industry pengolahan 4,46% dan 1,52%. Meski andil sector industry masih lebih kecil dari sector perdagangan/hotel/restaurant. Sector pertanian ataupun sector jasa-jasa, namun sector industry tetap merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi yang potensial karena sifat industry yang mampu mendorong pembentukan nilai tambah yang tinggi.

Tabel 4.1.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar harga Konstan (juta Rp) Tahun
1993-2008

Tahun	PDRB	GROWTH
1993*	11.130.316	6,40
1994	12.032.820	8,11
1995	13.006.042	8,09
1996	14.019.942	7,80
1997	14.499.393	3,51
1998	12.852.101	-11,18
1999	13.232.439	0,99
2000	13.762.522	5,03
2001	14.055.071	3,37
2002	14.687.284	4,02
2003	15.361.277	4,09
2004	16.146.444	5,12
2005	16.910.877	4,73
2006	17.535.749	3,70
2007	18.291.512	4,31
2008	19.208.938	5,02

Sumber: laporan BPS DIY, terbitan 2010 (data diolah)

Ket * : menggunakan Tahun dasar 2000

Berdasarkan pada data di atas produk domestik regional bruto dari tahun 1993-2008 fluktuatif. Penurunan paling tajam 1998. Itu terjadi karena pada saat itu Indonesia sedang mengalami krisis moneter dan krisis ekonomi dan berdampak pada pertumbuhan pendapatan perkapita di daerah.

2. Perkembangan Jumlah Penduduk

Dalam penelitian ini, untuk menjelaskan tentang gambaran umum perkembangan jumlah penduduk di Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta penulis menggunakan jumlah penduduk dari angkatan kerja. Untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk dari angkatan kerja di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat melalui data di bawah ini:

Tabel 4.2.

Perkembangan Jumlah Penduduk (Angk. Kerja) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1993-2008

Tahun	Jumlah Penduduk (Angk. Kerja)
1993*	1.512.323
1994	1.528.609
1995	1.415.529
1996	1.453.218
1997	1.493.940
1998	1.450.952
1999	1.524.870
2000	1.663.503
2001	1.645.799
2002**	1.644.190
2003	1.658.103
2004	1.701.802
2005	1.710.392
2006	1.750.575
2007	1.774.245
2008	1.892.205

Sumber: Laporan BSP DIY

Ket * : Jumlah Angkatan Kerja 10th ke atas

: Jumlah Angkatan Kerja 15th ke atas

Berdasarkan pada data di atas perkembangan jumlah penduduk dari angkatan kerja pada tahun 1993-2001 objek penelitian di Badan Pusat Statistik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan penduduk berumur 10 tahun ke atas. Sedangkan pada tahun 2002-2008 objek penelitian di Badan Pusat Statistik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan penduduk berumur 15 tahun ke atas.

Sementara jumlah penduduk berdasarkan hasil proyeksi SUPAS 2005, tahun 2007 jumlah penduduk Provinsi D.I. Yogyakarta tercatat 3.434.534 jiwa, dengan persentase jumlah penduduk laki-laki 50,16% dan penduduk perempuan 49,84%. Menurut daerah, persentase penduduk kota mencapai 60,57% dan penduduk desa mencapai 39,31% (Susenas 2007). Pertumbuhan penduduk –pada tahun 2007 sebesar 1,01% relative lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Kab. Bantul, Kab. Sleman, dan kota Yogyakarta memiliki angka pertumbuhan di atas angka Provinsi, masing-masing sebesar 1,46%, 1,34% dan 1,32%.

Dengan luas wilayah 3.185,80km² , kepadatan penduduk di D.I. Yogyakarta tercatat 1.079 jiwa per km². Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta yakni 13.881 jiwa per km² dengan luas wilayah hanya sekitar satu persen dari luas Prpinsi DIY. Sedangkan Kabupaten Gunung Kidul yang memiliki wilayah terluas mencapai 46,63% memiliki kepadatan penduduk terendah yang dihuni rata-rata 461 jiwa per km².

Komposisi kelompok umur penduduk DIY didominasi oleh kelompok usia dewasa yaitu umur 25-29 tahun sebesar 10,71%. Kelompok umur 0-24 tahun tercatat 36,35%, kelompok umur 25-59 tahun sebesar 50,84%, dan lanjut usia yaitu umur 60 tahun ke atas sebesar 12,81%. Besarnya proporsi mereka yang berusia lanjut mengisyaratkan tingginya usia harapan hidup penduduk DIY.

Tabel 4.3.

Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten / Kota di Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2008

No	Kab/Kota	Luas		TAHU				
		Km	%	2004	2005	2006	2007	2008
1	Kulonprogo	586,27	18,40	641	638	638	639	639
2	Bantul	506,85	15,91	1.61	1.719	1.744	1.77	1.795
3	Gunung Kidul	1.485,36	46,63	462	459	460	461	462
4	Sleman	574,82	18,04	1.642	1.739	1.763	1.786	1.81
5	Yogyakarta	32,50	1,02	12.246	13.52	13.7	13.881	14.059
	Propinsi DIY			1.01	1.056	1.067	1.071	1.089

Sumber : Badan Pusat Statistik DIY

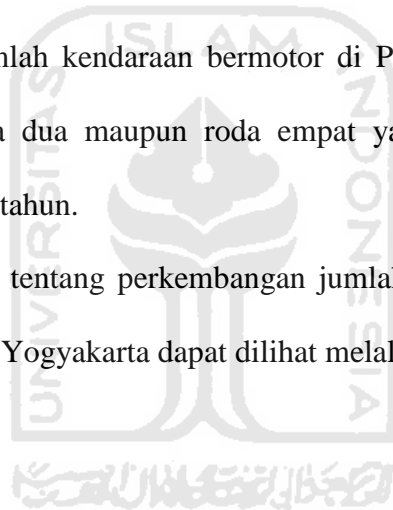
Kepadatan penduduk menurut Kabupaten / Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat bervariasi dilihat dari data di atas. Kabupaten Kulon Progo kepadatan penduduk dari tahun 2004-2008 fluktuatif dengan luas 586,27 km dan 18,40%. Kabupaten Bantul kepadatan penduduk dari tahun 2004-2008 mengalami kenaikan dengan luas 506,85 km dan 15,91%. Kabupaten Gunung Kidul kepadatan penduduk dari tahun 2004-2008 fluktuatif dengan luas 1.485,36 km dan 46,63%. Kabupaten Sleman kepadatan penduduk dari tahun 2004-2008

mengalami kenaikan dengan luas 574,82 km dan 18,04%. Dan kota Yogyakarta kepadatan penduduk dari tahun 2004-2008 mengalami kenaikan dengan luas 32,50 km dan 1,02%. Dari 5 Kabupaten / Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepadatan penduduk yang paling banyak adalah di kota Yogyakarta karena kota Yogyakarta merupakan pusat atau sentral kegiatan pemerintah daerah.

3. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta baik itu roda dua maupun roda empat yang terdaftar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Untuk mengetahui tentang perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat melalui data di bawah ini:



Tabel 4.4

Pedrkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (unit) Tahun 1993-2008

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor
1993	332.635
1994	362.569
1995	641.618
1996	768.942
1996	513.278
1998	531.117
1999	539.378
2000	530.345
2001	635.471
2002	705.559
2003	782.228
2004	877.917
2005	976.137
2006	1.055.475
2007	1.161.686
2008	1.276.336

Sumber: Laporan BPS & DISPENDA DIY, terbitan 2010

Berdasarkan data di atas tentang jumlah kendaraan bermotor di propinsi Dearah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor dari tahun 1993-1996 mengalami peningkatan tetapi pada tahun 1997 mengalami penurunan. Dan pada tahun 1998-2008 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

b. **Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten / Kota**

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di kabupaten / kota di propinsi daerah istimewa yogyakarta baik itu roda dua maupun roda empat yang terdaftar mengalami peningkatan drai tahun ketahun. Untuk mengetahui

tentang perkembangan jumlah kendaraan bermotor di kabupaten / kota propinsi daerah istimewa yogyakarta dapat dilihat melalui data di bawah ini:

Tabel 4.5

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di kabupaten / kota propinsi daerah istimewa yogyakarta (unit) tahun 1998-2008

Tahun	yogyakarta	Bantul	kulonprogo	gunung kidul	sleman
2005	196.691	192.852	58.210	65.774	836.227
2006	207.471	205.201	64.636	72.952	898.048
2007	217.001	229.144	70.819	81.956	373.144
2008	247.346	249.570	79.714	95.454	373.144

sumber: laporan DISPENDA DIY, terbitan 2010

Berdasarkan data di atas tentang jumlah kendaraan bermotor di kabupaten / kota di propinsi daerah istimewa yogyakarta baik itu roda dua dan roda empat mengalami peningkatan dari tahun 2005-2008.

4. Perkembangan pajak kendaraan bermotor DIY

Perkembangan pajak kendaraan berpengaruh kepada signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di propinsi daerah istimewa yogyakarta. Disebabkan karena pajak atas kendaraan bermotor penerimaan terbesar dan dominan dalam penerimaan pajak daerah. Untuk mengetahui perkembangan pajak kendaraan bermotor di propinsi daerah istimewa yogyakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6

**Perkembangan Pajak Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (Milyar Rp) Tahun 1993-2008**

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor
1993	17.440.623.542
1994	18.827.249.427
1995	21.640.493.980
1996	27.396.178.941
1997	29.888.908.564
1998	37.035.887.096
1999	38.326.505.904
2000	38.727.887.171
2001	53.177.830.870
2002	66.953.503.135
2003	87.824.820.800
2004	120.788.351.375
2005	149.291.828.905
2006	176.946.972.390
2007	206.659.041.270
2008	222.137.597.800

Sumber: Laporan BPS & DIPENDA DIY, terbitan 2010 (data diolah)

Berdasarkan data di atas tentang perkembangan pajak kendaraan bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperoleh bahwa dari tahun 1993-2008, pajak atas kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

4.2. Analisis Data

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor yang meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah penduduk, dan Jumlah Kendaraan Bermotor (JKB) terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peneliti menggunakan data sekunder yang didapatkan dari data Dinas Pendapatan Asli Daerah (DISPENDA DIY) dan badan Pusat Statistik (BPS DIY).

Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan, selanjutnya dilakukan analisa data dengan menggunakan metode statistik yang membahas tehnik pengumpulan data, penyajian, pengolahan atau analisa dan interpretasi (penarikan kesimpulan) terhadap suatu data.

Sesuai dengan hipotesa yang disajikan yaitu :

1. Diduga Domestik regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Diduga Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Diduga Jumlah Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan adanya hipotesa di atas, maka dilakukan analisis untuk melakukan apakah hipotesa tersebut diterima atau ditolak, terlebih dahulu ditentukan variabel-variabel yang diduga dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Di Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta adalah :

X_1 = Domestik regional Bruto (PDRB)

X_2 = Jumlah Penduduk

X_3 = Jumlah Kendaraan Bermotor

Y = Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang ada untuk membuktikan bahwa variabel-variabel independen tersebut (X_1 , X_2 , dan X_3) mempengaruhi variabel.

4.2. Analisis Data

Analisis data ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor yang meliputi Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta.

Peneliti menggunakan data sekunder yang didapatkan dari data Dinas Pendapatan Asli Daerah (DISPENDA DIY) dan Badan Pusat Statistik (BPS DIY).

Analisis yang digunakan adalah uji asumsi dan pengujian hipotesa (analisis regresi linier berganda).

4.2.1. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis data dimana data-datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan analisis statistik. Sebelum analisis data dilakukan sebelumnya diperlukan beberapa asumsi yang harus dipenuhi yang biasanya disebut asumsi klasik.

4.2.2.1. Hasil Analisis Regresi

Dependent Variable: PKBT

Method: Least Squares

Date: 01/16/12 Time: 19:30

Sample: 1993 2008

Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.05E+11	8.66E+10	-4.676063	0.0005
PDRB	9451.756	3966.123	2.383122	0.0346
JPT	177415.1	54350.12	3.264300	0.0068
JKBT	79838.19	35382.62	2.256424	0.0435
R-squared	0.946368	Mean dependent var		7.87E+10
Adjusted R-squared	0.932960	S.D. dependent var		6.79E+10
S.E. of regression	1.76E+10	Akaike info criterion		50.23049
Sum squared resid	3.71E+21	Schwarz criterion		50.42364
Log likelihood	-397.8439	F-statistic		70.58186
Durbin-Watson stat	1.754749	Prob(F-statistic)		0.000000

Asumsi klasik terdiri dari beberapa jenis uji yaitu uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. Analisis data dilakukan dengan menggunakan komputer, program yang digunakan adalah Eview 3.0.

a. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas dapat diartikan bahwa dimana terjadi situasi adanya korelasi diantara variabel-variabel bebas yang satu dengan lainnya. Dalam penelitian ini pengujian adanya multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan besarnya nilai R^2 dan besarnya nilai R^2 model.

Hipotesanya :

- ◆ H_0 : Tidak terjadi multikolinieritas pada tiap-tiap variabel bebas.
- ◆ H_a : Terjadi multikolinieritas pada tiap-tiap variabel bebas.

Kriteria pengambilan kesimpulannya adalah :

- ◆ Jika nilai R^2 lebih besar dari R^2 model, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya ada multikolinieritas”.
- ◆ Dan ”jika jika nilai R^2 lebih kecil dari R^2 model, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya tidak ada multikolinieritas.

Dari pengolahan data dengan menggunakan program Eview 3.0, didapatkan hasil analisis pengujian multikolinieritas yang dirangkum dan disajikan pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2

Rangkuman Hasil Pengujian Multikolinieritas

Variabel	Nilai R ²	R ² Model	Kesimpulan
PDRB	0.741207	0.946368	Tidak terjadi Multikolinieritas
Jumlah Penduduk	0.649096	0.946368	Tidak terjadi Multikolinieritas
Jumlah Kendaraan Bermotor	0.835306	0.946368	Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber : Data primer diolah, 2011

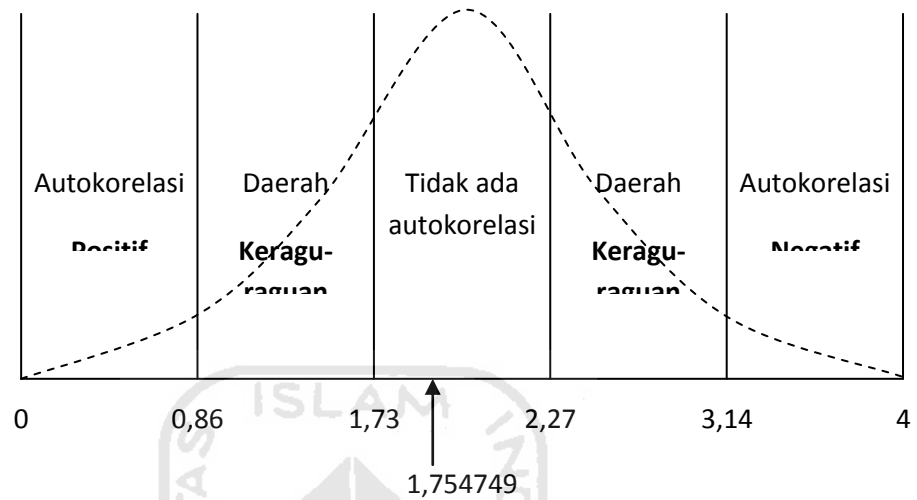
Dari analisis data yang ditunjukkan pada tabel di atas diperoleh bahwa semua nilai R² lebih kecil dari nilai R² model, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebasnya tidak terjadi multikolinieritas.

b. Uji Autokorelasi

Yang dimaksud dengan autokorelasi adalah suatu keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel gangguan pada periode lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian menggunakan Durbin-Watson Test.

Hasil pengujian Autokorelasi yang telah dilakukan diperoleh statistik d sebesar 1.754749, dengan dL = 0,86 dan dU = 1,73.

Ada tidaknya gejala autokorelasi pada model regresi divisualisasikan seperti terlihat pada gambar 4.1 :



Gambar 4.1

Gambar Penerimaan H_0 untuk Uji Autokorelasi

Dari gambar di atas terlihat bahwa nilai statistik $d = 1,754749$ terletak pada daerah tidak terdapat autokorelasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi pada model regresi linier klasik adalah bahwa varians setiap disturbance terms yang dibatasi oleh nilai tertentu mengenai variabel-variabel bebas adalah berbentuk suatu nilai konstan yang sama dengan σ^2 .

Pendeteksian gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat adanya korelasi yang signifikan antara kuadrat residual dengan variabel bebasnya, dengan menggunakan model Park.

Kriteria pengambilan keputusannya adalah, bahwa jika besarnya koefisien masing-masing besarnya variabel bebas dengan nilai residualnya tidak signifikan pada taraf kepercayaan 5% atau nilai p-value (probabilitas) $> 0,05$, maka tidak terjadi heterokedastisitas pada variabel bebas tersebut. Rangkuman hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3

Rangkuman hasil uji Heteroskedastisitas Park

Variabel	Sig.	Kesimpulan
PDRB	0,8828	Tidak terjadi heteroskedstisitas
Jumlah Penduduk	0,2812	Tidak terjadi heteroskedstisitas
Jumlah Kendaraan Bermotor	0,7429	Tidak terjadi heteroskedstisitas

Sumber : Data primer diolah, 2012

Dari tabel di atas diperoleh bahwa semua p-value (probabilitas) $> 0,05$ (5%), disimpulkan bahwa semua variabel bebas tidak terdapat gejala Heteroskedastisitas.

C. Pengujian Hipotesis (Analisis Regresi Berganda)

1. Persamaan Regresi

Model regresi linear berganda untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X_1), Jumlah Penduduk (X_2) dan Jumlah Kendaraan Bermotor (X_3), terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) mempunyai rumusan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Analisis regresi linear berganda menggunakan program Eview 3.0 yang hasilnya dirangkum pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4

Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Regression Coeficient	t-hitung	Probabilitas	Keterangan
(X_1)	9451,756	2,38312 2	0.0346	Signifikan
(X_2)	177415,1	3,26430 0	0.0068	Signifikan
(X_3)	79838,19	2,25642 4	0.0435	Signifikan

Sumber : Data Primer Diolah, 2011

Dari Tabel 4.4 diatas dapat disusun persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = -405.000.000.000 + 9451,756 X_1 + 177415,1 X_2 + 79838,19 X_3$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diartikan sebagai berikut :

a. Konstanta (a)

Dalam persamaan regresi di atas memiliki konstantanya sebesar -405.000.000.000, artinya jika variabel Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (X_1), Jumlah Penduduk (X_2) dan Jumlah Kendaraan Bermotor (X_3) tidak berubah atau sama dengan 0 (nol), maka Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor akan menurun sebesar -405.000.000.000 unit.

b. Koefisien Produk Domestik Regional Bruto (b_1)

Variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_1) merupakan variabel yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan koefisien regresi positif yaitu sebesar 9451,756. Berarti bila Produk Domestik Regional Bruto (X_1) meningkat sebesar satu juta rupiah maka Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) akan meningkat sebesar 9.451.756 rupiah dengan anggapan variabel yang lain konstan (tetap).

c. Koefisien Jumlah Penduduk (b_2)

Faktor Jumlah Penduduk (X_2) merupakan variabel yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan koefisien regresi positif yaitu sebesar 177415,1. Berarti bila Jumlah Penduduk (X_2) meningkat sebesar satu jiwa maka Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) akan meningkat sebesar 177415,1 rupiah dengan anggapan variabel yang lain konstan (tetap).

d. Koefisien Jumlah Kendaraan Bermotor (b_3)

Faktor Jumlah Kendaraan Bermotor (X_3) merupakan variabel yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) dengan koefisien regresi negatif yaitu sebesar 79838,19. Berarti bila Jumlah Kendaraan Bermotor (X_3) meningkat sebesar satu unit maka Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) akan meningkat sebesar 79838,19 rupiah dengan anggapan variabel yang lain konstan (tetap).

2. Uji Serentak (Uji-F)

➤ Hipotesa :

Ho : Tidak ada pengaruh secara bersama-sama antara Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1993-2008.

Ha : Ada pengaruh secara bersama-sama antara Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1993-2008.

➤ Statistik uji : F

Dari pengujian diperoleh

$$F\text{-hitung} = 70,58186$$

$$F\text{-tabel} (5\%; df=3; 12) = 3,490$$

➤ Kriteria pengambilan kesimpulan :

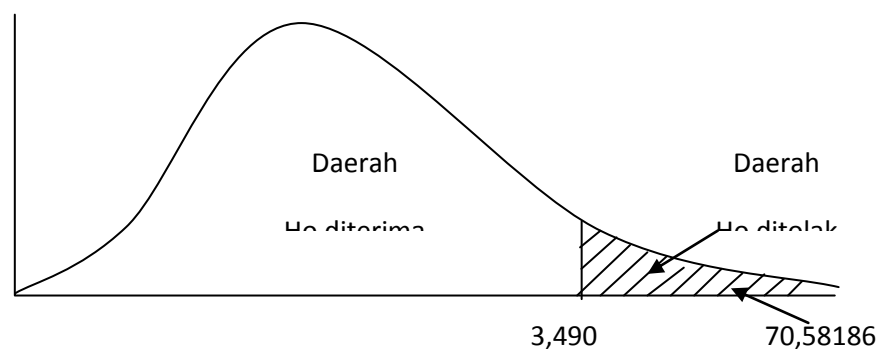
- ◆ Jika $F\text{ hitung} > 3,490$; $p < 0,05$; H_0 ditolak dan H_a diterima.
- ◆ Jika $F\text{ hitung} < 3,490$, dan $p > 0,05$, H_0 diterima dan H_a ditolak.

Secara visual daerah penerimaan dan penolakan hipotesa untuk uji serentak disajikan pada gambar 4.2 berikut :

Gambar 4.2

Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa

Uji Serentak



➤ Kesimpulan

Karena $F\text{-hitung} = 70,58186 > F\text{-tabel}=3,490$, dan $p=0,000 < 0,05$ (5%), maka disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dapat dikatakan bahwa Ada pengaruh secara bersama-sama antara Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1993-2008. Jadi hipotesis yang diajukan terbukti kebenarannya.

3. Uji t (Uji Individual)

1) Pengaruh Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X_1) terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

➤ Hipotesa :

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1993-2008.

H_a : Ada pengaruh yang signifikan antara variabel Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1993-2008.

➤ Statistik uji : t

Dari pengujian diperoleh

$$t\text{-hitung} = 2,383122$$

$$t\text{-tabel} (2,5\%; df=12) = 2,179$$

➤ Kriteria pengambilan kesimpulan :

◆ Jika $-2,179 < t \text{ hitung} < + 2,179$, dan $p < 0,05$; H_0 ditolak dan H_a diterima.

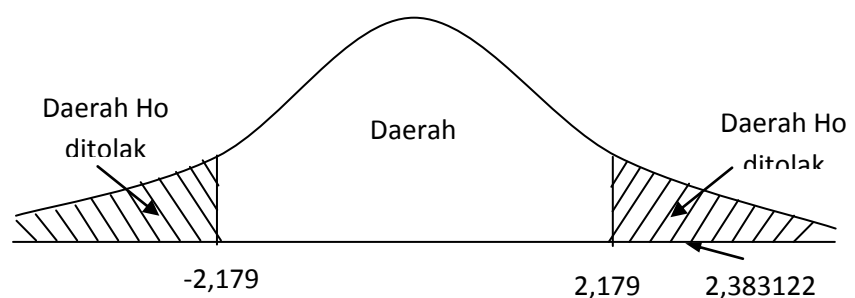
◆ Jika $-2,179 > t \text{ hitung} < + 2,179$, dan $p > 0,05$, H_0 diterima dan H_a ditolak.

Secara visual daerah penerimaan dan penolakan hipotesa untuk variabel Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disajikan pada gambar 4.3 berikut:

Gambar 4.3

Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa

Variabel Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB)



➤ Kesimpulan

Karena $t\text{-hitung} = 2,383122 > t\text{-tabel}=2,179$, dan $p=0,0346 < 0,05$ (5%), maka disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat dikatakan bahwa Ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

2) Pengaruh Jumlah penduduk (X_2) terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

➤ Hipotesa :

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan variabel Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

H_a : Ada pengaruh variabel Jumlah Penduduk yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa.

➤ Statistik uji : t

Dari pengujian diperoleh

$$t\text{-hitung} = 3,264300$$

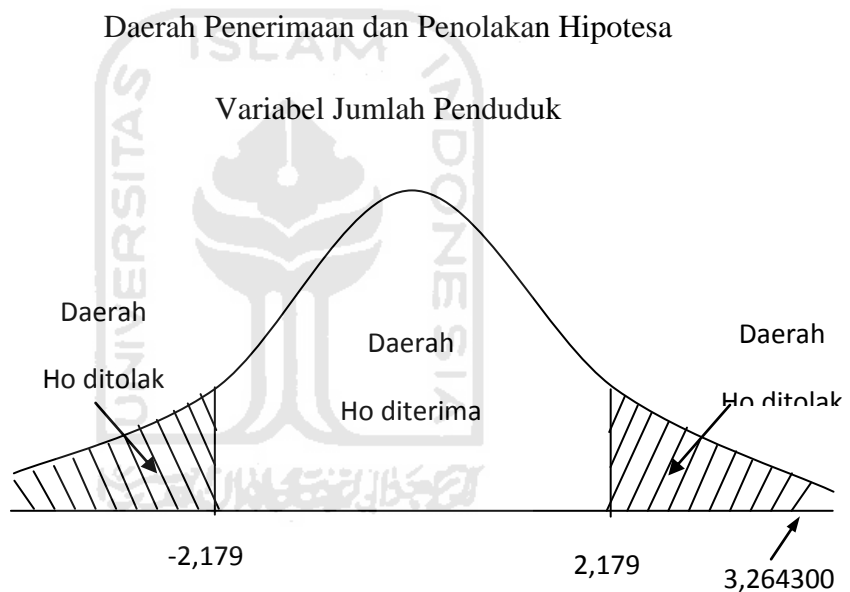
$$t\text{-tabel} (2,5\%; df=12) = 2,179$$

➤ Kriteria pengambilan kesimpulan :

- ◆ Jika $-2,179 < t \text{ hitung} < + 2,179$, dan $p < 0,05$; H_0 ditolak dan H_a diterima.
- ◆ Jika $-2,179 > t \text{ hitung} < + 2,179$, dan $p > 0,05$, H_0 diterima dan H_a ditolak.

Secara visual daerah penerimaan dan penolakan hipotesa untuk variabel Jumlah Penduduk disajikan pada gambar 4.4 berikut:

Gambar 4.4



➤ Kesimpulan

Karena $t\text{-hitung} = 3,264300 > t\text{-tabel}=2,179$, dan $p=0,0068 < 0,05$ (5%), maka disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat dikatakan bahwa Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1993-2008.

3) Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor (X_3) terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

➤ Hipotesa :

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan variabel Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1993-2008.

Ha : Ada pengaruh variabel Jumlah Kendaraan Bermotor yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1993-2008.

➤ Statistik uji : t

Dari pengujian diperoleh

$$t\text{-hitung} = 2,256424$$

$$t\text{-tabel} (2,5\%; df=12) = 2,179$$

➤ Kriteria pengambilan kesimpulan :

◆ Jika $-2,179 < t \text{ hitung} < + 2,179$, dan $p < 0,05$; Ho ditolak dan Ha diterima.

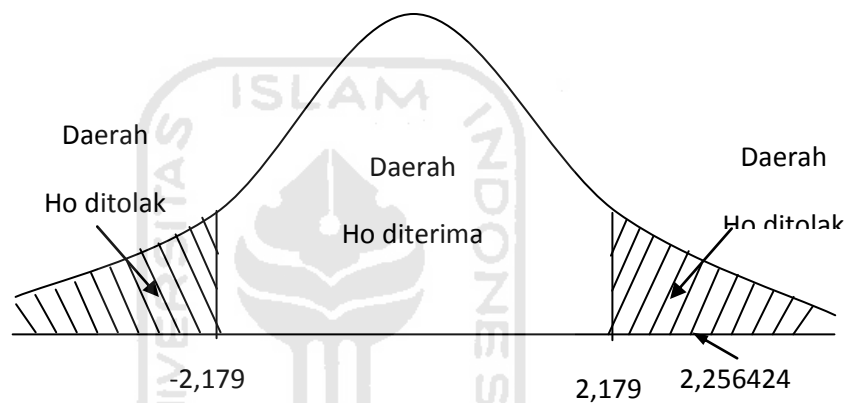
◆ Jika $-2,179 > t \text{ hitung} < + 2,179$, dan $p > 0,05$, Ho diterima dan Ha ditolak.

Secara visual daerah penerimaan dan penolakan hipotesa untuk variabel Jumlah Kendaraan Bermotor disajikan pada gambar 4.5 berikut:

Gambar 4.5

Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa

Variabel Jumlah Kendaraan Bermotor



➤ Kesimpulan

Karena $t\text{-hitung} = 2,256424 > t\text{-tabel} = 2,179$, dan $p = 0,0435 < 0,05$ (5%), maka disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat dikatakan bahwa Ada pengaruh antara Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1993-2008.

4. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Dari hasil pengujian diperoleh besarnya koefisien korelasi ganda (R) sebesar 0,972814 dan dapat dikatakan bahwa korelasi antara Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah

Penduduk dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1993-2008 adalah berkorelasi tinggi.

Sedangkan koefisien determinasi (R-Square) sebesar 0,946368 yang menunjukkan bahwa 94,6368% variasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1993-2008 ditentukan oleh adanya faktor Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan Bermotor. Sedangkan sisanya sebesar 5,3632% variasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1993-2008 ditentukan oleh faktor yang lain di luar model.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil pengujian di atas bahwa melalui metode kuantitatif regresi lillier berganda telah terbukti apabila variabel Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (X_1), Jumlah Penduduk (X_2) dan Jumlah Kendaraan Bermotor (X_3) secara serentak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Hasil analisis regresi diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 70,58186, sedangkan F_{tabel} sebesar 3,490. Jadi F_{hitung} ($70,58186$) $>$ F_{tabel} ($3,490$). Nilai p (peluang ralat) = $0,000 <$ taraf signifikansi = $0,05$. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (X_1), Jumlah Penduduk (X_2) dan Jumlah Kendaraan Bermotor (X_3) terhadap Penerimaan

Pajak Kendaraan Bermotor (Y) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian hipotesis pertama yang berbunyi "Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan Bermotor berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" terbukti kebenarannya.

Sedangkan secara individu variabel Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X_1) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Dari hasil uji T membuktikan bahwa nilai T_{hitung} (2,383122) lebih besar (T_{tabel} (2,179). Nilai p (peluang ralat) = 0,0346 < taraf signifikansi = 0,05, yang mempunyai arti bahwa variabel Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai pengaruh yang positif dan sangat signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Variabel Jumlah Penduduk (X_2) secara individu juga mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, karena setelah dibuktikan secara statistik dengan uji T terbukti bahwa nilai T_{hitung} (3,264300) lebih besar dari T_{tabel} (2,179). Nilai p (peluang ralat) = 0,0068 < taraf signifikansi = 0,05, yang mempunyai arti bahwa variabel Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh yang positif dan sangat signifikan terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sedangkan variabel Jumlah Kendaraan Bermotor (X_3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil uji T membuktikan bahwa nilai T_{hitung} (2,256424) lebih besar dari T_{tabel} (2,179). Nilai p (peluang ralat) = 0,0435 < taraf signifikansi = 0,05, yang mempunyai arti bahwa variabel Jumlah Kendaraan Bermotor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari hasil pengujian diperoleh besarnya koefisien korelasi ganda (R) sebesar 0,972814 dan dapat dikatakan bahwa korelasi antara Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah berkorelasi tinggi. Sedangkan koefisien determinasi (R-Square) sebesar 0,946368 yang menunjukkan bahwa 94,6368% variasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditentukan oleh adanya faktor Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan Bermotor. Sedangkan sisanya sebesar 5,3632% variasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditentukan oleh faktor yang lain di luar variabel yang diteliti.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan Bermotor dapat mempengaruhi besar kecilnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Semakin tinggi Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan Bermotor akan diikuti semakin tingginya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hipotesis yang berbunyi Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan Bermotor berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terbukti kebenarannya. Maka dapat diartikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh yang berarti bagi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Maka dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh yang berarti bagi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Jumlah Penduduk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terbukti kebenarannya probabilitas Maka dapat disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk tidak memiliki pengaruh yang berarti bagi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Variabel Jumlah Kendaraan Bermotor berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Maka dapat disimpulkan bahwa Jumlah Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh yang berarti bagi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Dari hasil pengujian diperoleh besarnya koefisien korelasi ganda (R) sebesar dan dapat dikatakan bahwa korelasi antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah berkorelasi tinggi. Sedangkan koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa variasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditentukan oleh adanya faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan Bermotor. Sedangkan sisanya dari variasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ditentukan oleh faktor yang lain di luar variabel yang diteliti.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, sebagai masukan dan rekomendasi bagi pemerintah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor yang memiliki tahun produksi atau keluaran pada tahun lama sebaiknya jumlah kapasitas kepemilikannya dikurangi karena nilai pajak yang dimiliki oleh kendaraan bermotor tahun lama memiliki nilai pajak yang rendah dari pada nilai pajak yang dikenakan pada kendaraan bermotor yang tahun pengeluarannya masih dikatakan baru.
2. Perubahan plat pada kendaraan bermotor dari dalam kota sebaiknya tidak dapat dirubah menjadi plat daerah lain karena dapat mengurangi tingkat atau jumlah penerimaan pajak daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, 2005, perpajakan, Yogyakarta:
UPP AMP YKPN.

Arsyad Lincoln, 1999, Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta: STIE YKPN.

Badan Pusat Statistik, 2011, Jumlah Kendaraan bermotor Tahun 1993-2008,
Yogyakarta: BPS.

_____, 2011, Jumlah Penduduk (Angkt. Kerja) di Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 1993-2008, Yogyakarta: BPS.

_____, 2011, Kepadatan Penduduk Kab/Kota di Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2008, Yogyakarta: BPS.

_____, 2011, Pajak Daerah di Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 1993-2008, Yogyakarta: BPS.

_____, 2011, Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 1993-2008, Yogyakarta : BPS.

_____, 2011, Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 1993-2008, Yogyakarta: BPS.

_____, 2011, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Konstan Tahun 1993-2008, Yogyakarta: BPS.

_____, 2011, Pertumbuhan Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993-2008, Yogyakarta: BPS.

_____, 2011, Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar harga Konstan Tahun 1993-2008, Yogyakarta: BPS.

Dinas Pendapatan Asli Daerah, 2011, Pajak Daerah tahun 2001-2008 DIY, Yogyakarta: Dispenda..

_____, 2011, Pajak Kendaraan Bermotor Kab/Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2001-2008, Yogyakarta: Dispenda.

_____, 2011, Jumlah Kendaraan Bermotor Kab/Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2008, Yogyakarta: Dispenda.

Djarwanto Ps, 1991, statistik Nonparametrik, Yogyakarta: BPFE.

Dumairy, 2004, perekonomian Indonesia, Yogyakarta: Erlangga.

Dwiyanti Dhani Parmasari, 2006, Permana pajak dalam pendapatan asli daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun Anggaran 1996-2003, Yogyakarta.

Enda Wijaya, 2003, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Paak Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Kota Yogyakarta).

Hermanto; sptyuningsih, E, (2002), Electrenic data Processing (EDP) SPSS 10,0
& Eviuews 3.0 , UPFE-UMY, Yogyakarta.

Muana Nanga, 2001, Makro Ekonomi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Salma Sukthan, 1997, Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Pajak
Pembangunan I dalam Mendukung Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(Studi Kasus Kabupaten dati II Semarang).

Selamat Bamin, 2002, Analisis yang Mempengaruhi Penerimaan Pajka Daerah di
Propinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)



Lampiran 1

DATA PENELITIAN

Tahun	PDRB (Rupiah)	Jumlah Penduduk (JPt) (Orang)	Jumlah Kendaraan Bermotor (JKBt) (unit)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKBt) (Dalam Milyaran Rupiah)
1993	12.440.623.542	10.130.316	1.512.323	332.635
1994	15.827.249.427	12.032.820	1.528.609	362.569
1995	17.640.493.980	13.006.042	1.415.529	641.618
1996	27.396.178.941	14.019.942	1.453.218	768.942
1997	29.888.908.564	14.499.393	1.423.940	513.278
1998	37.035.887.096	1.485.101	1.450.952	531.117
1999	38.326.505.904	13.232.439	1.524.870	539.378
2000	38.727.887.171	13.762.522	1.663.503	530.345
2001	53.177.830.870	12.055.071	1.645.799	635.471
2002	66.953.503.135	14.687.284	1.644.190	705.559
2003	87.824.820.800	15.361.277	1.658.103	782.228

2004	100.788.351.375	16.146.444	1.701.802	877.917
2005	149.291.828.905	16.910.877	1.710.392	976.137
2006	176.946.972.390	17.535.749	1.750.575	1.055.475
2007	200.137.597.800	17.208.938	1.892.205	1.476.336
2008	206.659.041.270	18.291.512	1.774.245	1.261.686



Lampiran 2

Analisis Regresi

Dependent Variable: PKBT

Method: Least Squares

Date: 01/16/12 Time: 19:30

Sample: 1993 2008

Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.05E+11	8.66E+10	-4.676063	0.0005
PDRB	9451.756	3966.123	2.383122	0.0346
JPT	177415.1	54350.12	3.264300	0.0068
JKBT	79838.19	35382.62	2.256424	0.0435
R-squared	0.946368	Mean dependent var		7.87E+10
Adjusted R-squared	0.932960	S.D. dependent var		6.79E+10
S.E. of regression	1.76E+10	Akaike info criterion		50.23049
Sum squared resid	3.71E+21	Schwarz criterion		50.42364
Log likelihood	-397.8439	F-statistic		70.58186
Durbin-Watson stat	1.754749	Prob(F-statistic)		0.000000

Lampiran 3

Uji Multikolinieritas

Dependent Variable: PDRB

Method: Least Squares

Date: 01/16/12 Time: 20:31

Sample: 1993 2008

Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11507300	5143109.	2.237421	0.0434
PDRB	-1.108099	3.788246	-0.292510	0.7745
JKBT	6.517535	1.689555	3.857545	0.0020
R-squared	0.741207	Mean dependent var		14608295
Adjusted R-squared	0.701393	S.D. dependent var		2250003.
S.E. of regression	1229513.	Akaike info criterion		31.04950
Sum squared resid	1.97E+13	Schwarz criterion		31.19436
Log likelihood	-245.3960	F-statistic		18.61661
Durbin-Watson stat	1.845504	Prob(F-statistic)		0.000153

Dependent Variable: JPT

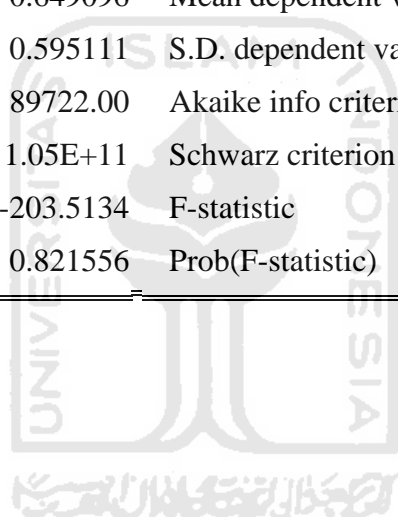
Method: Least Squares

Date: 01/16/12 Time: 20:32

Sample: 1993 2008

Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1399721.	210691.9	6.643452	0.0000
PDRB	-0.005901	0.020173	-0.292510	0.7745
JKBT	0.394800	0.143567	2.749923	0.0165
R-squared	0.649096	Mean dependent var		1609391.
Adjusted R-squared	0.595111	S.D. dependent var		141003.8
S.E. of regression	89722.00	Akaike info criterion		25.81418
Sum squared resid	1.05E+11	Schwarz criterion		25.95904
Log likelihood	-203.5134	F-statistic		12.02359
Durbin-Watson stat	0.821556	Prob(F-statistic)		0.001106



Dependent Variable: JKBT

Method: Least Squares

Date: 01/16/12 Time: 20:32

Sample: 1993 2008

Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1946067.	411119.2	-4.733583	0.0004
PDRB	0.081891	0.021229	3.857545	0.0020
JPT	0.931531	0.338748	2.749923	0.0165
R-squared	0.835306	Mean dependent var		749418.2
Adjusted R-squared	0.809969	S.D. dependent var		316152.5
S.E. of regression	137819.1	Akaike info criterion		26.67263
Sum squared resid	2.47E+11	Schwarz criterion		26.81749
Log likelihood	-210.3811	F-statistic		32.96715
Durbin-Watson stat	1.826803	Prob(F-statistic)		0.000008

Lampiran 4

Uji Heteroskedastisitas (Park)

Dependent Variable: E2

Method: Least Squares

Date: 01/16/12 Time: 20:58

Sample: 1993 2008

Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-9.17E+20	1.23E+21	-0.747668	0.4691
PDRB	-8.46E+12	5.62E+13	-0.150578	0.8828
JPT	8.69E+14	7.70E+14	1.128486	0.2812
JKBT	-1.68E+14	5.01E+14	-0.335727	0.7429
R-squared	0.113416	Mean dependent var		2.32E+20
Adjusted R-squared	-0.108230	S.D. dependent var		2.37E+20
S.E. of regression	2.49E+20	Akaike info criterion		96.97864
Sum squared resid	7.44E+41	Schwarz criterion		97.17179
Log likelihood	-771.8291	F-statistic		0.511698
Durbin-Watson stat	2.507907	Prob(F-statistic)		0.681778